

PELATIHAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM BAGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Gunardi Lie¹, Jelita Damai Sofia Lorenza Sihite², Louis Sebastian Anot Putra³
& Stanley Muljadi Art⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : gunardi@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : s.jelita@tarumanagarafoundation.org

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : louis.205220079@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email : stanley.205220062@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Indramayu Regency has great potential in the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) spread across various economic sectors. However, the contribution of MSMEs to regional economic growth is still relatively low due to the non-optimization of inclusive and pro-investment regional policies. Based on these conditions, this community service activity aims to increase the capacity of local government officials in designing MSME development policies that are data-based, participatory, and adaptive to local needs. The methods used include workshops, focus group discussions (FGDs), and simulations of drafting regulations, with a collaborative approach between academics, government, and business actors. It is expected that this activity can produce a policy framework that is more adaptive to the needs of the business world, improve the investment climate, and strengthen the role of MSMEs in sustainable regional economic development. The results of this activity include scientific publication articles indexed by SINTA or international journals, registration of intellectual property rights (IPR) for educational materials, and development of products or prototypes that support digital legal literacy. With this activity, it is hoped that the Indramayu government can be more aware of the law and can be more effective in formulating MSME development policies.

Keywords: MSMEs, public policy, local government, Indramayu, community service.

ABSTRAK

Kabupaten Indramayu memiliki potensi besar dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar di berbagai sektor ekonomi. Namun, kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah masih tergolong rendah akibat belum optimalnya kebijakan daerah yang inklusif dan pro-investasi. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam merancang kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis data, partisipatif, dan adaptif terhadap kebutuhan lokal. Metode yang digunakan meliputi workshop, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan simulasi penyusunan regulasi, dengan pendekatan kolaboratif antara akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha. Diharapkan, kegiatan ini dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha, meningkatkan iklim investasi, serta memperkuat peran UMKM dalam pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini mencakup artikel publikasi ilmiah terindeks SINTA atau jurnal internasional, pendaftaran hak kekayaan intelektual (HKI) atas materi edukatif, serta pengembangan produk atau prototipe yang mendukung literasi hukum digital. Dengan kegiatan ini, diharapkan pemerintah Indramayu dapat lebih sadar hukum dan dapat lebih efektif dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM.

Kata kunci: UMKM, kebijakan publik, pemerintah daerah, Indramayu, pengabdian masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan yang sangat penting dalam struktur perekonomian nasional. Peran UMKM tidak hanya terbatas pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka kemiskinan, tetapi juga mencakup kontribusi mereka dalam memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat daerah dan nasional. UMKM sering kali menjadi sektor ekonomi yang paling tahan terhadap guncangan ekonomi global, karena sifat usahanya yang fleksibel, berbasis komunitas, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal (Sidebang et

al, 2025). Oleh karena itu, pengembangan UMKM merupakan salah satu strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Siska et al, 2025).

Di Indonesia, UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (2023), UMKM berkontribusi sekitar 60,5% terhadap PDB nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Angka ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM bukan hanya relevan dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi sosial, karena berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan (Martaviona & Nurhalimah, 2025).

Salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam pengembangan UMKM adalah Kabupaten Indramayu, yang terletak di pesisir utara Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini memiliki lebih dari 78.000 pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor, seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan industri rumah tangga (Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu, 2023). Potensi ini, jika dikelola dengan baik, dapat menjadi motor penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Indramayu masih tergolong rendah, hanya sekitar 35%, dengan tingkat pertumbuhan yang stagnan dalam lima tahun terakhir.

Meskipun secara kuantitatif jumlah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Indramayu tergolong sangat besar, kontribusi mereka terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut masih relatif rendah, yaitu hanya sekitar 35%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan UMKM yang melimpah belum diiringi dengan optimalisasi peran mereka dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sehingga dapat diartikan bahwa pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan terintegrasi untuk mendukung UMKM secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pandangan konstruktif untuk meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis data, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan daya saing UMKM. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih efektif dalam melakukan pembinaan, pendataan, dan pengembangan UMKM sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

Lebih lanjut, tingkat pertumbuhan kontribusi UMKM terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir juga menunjukkan pola yang stagnan, tanpa peningkatan yang berarti. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa terdapat hambatan struktural dan kebijakan yang belum sepenuhnya mampu memfasilitasi pertumbuhan sektor UMKM secara berkelanjutan. Fakta tersebut menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Indramayu dengan sumber daya alam, letak geografis strategis, serta jumlah pelaku usaha yang besar dan realisasi kontribusi sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Kesenjangan ini menjadi perhatian serius, karena potensi yang tidak dimanfaatkan secara optimal berarti peluang ekonomi daerah yang hilang.

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi peran UMKM tersebut adalah keterbatasan kapasitas regulasi daerah (Candra & Lie. G, 2024). Regulasi yang ada seringkali belum responsif terhadap kebutuhan nyata para pelaku usaha kecil dan menengah. Banyak kebijakan yang bersifat sektoral, tidak terintegrasi, dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari UMKM dalam proses perumusannya. Akibatnya, berbagai aspek penting seperti akses terhadap

perizinan usaha, sumber pembiayaan, pelatihan peningkatan kapasitas, hingga jaringan pemasaran masih menjadi tantangan besar bagi para pelaku UMKM (Nurhalita, 2022).

Kondisi ini menjadi lebih kompleks di daerah berkembang seperti Indramayu, di mana dukungan infrastruktur kelembagaan, pendampingan usaha, dan inovasi kebijakan masih belum memadai. Tanpa adanya intervensi serius dalam bentuk perbaikan regulasi yang lebih inklusif, berbasis data (*evidence-based policy*), dan adaptif terhadap perubahan zaman, potensi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah sulit untuk dioptimalkan (Siregar & Pratama, 2019). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan terkoordinasi dari pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memperbaiki kualitas regulasi serta memperkuat ekosistem pendukung UMKM. Pendekatan yang bersifat partisipatif, inovatif, dan berbasis bukti menjadi kunci untuk menghasilkan kebijakan yang benar-benar mampu mendorong pertumbuhan dan ketahanan sektor UMKM di Kabupaten Indramayu.

Dalam menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), diperlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah (Indah et al, 2025). Peningkatan kapasitas ini terutama harus difokuskan pada aspek perencanaan, perumusan, dan penyusunan kebijakan publik yang lebih partisipatif, berbasis data (*evidence-based*), serta responsif terhadap kebutuhan nyata UMKM di tingkat lokal.

Aparatur pemerintah daerah perlu dibekali dengan pemahaman yang kuat mengenai pentingnya melibatkan pelaku UMKM dalam setiap tahapan proses penyusunan kebijakan, mulai dari identifikasi masalah, perumusan solusi, hingga evaluasi dampak kebijakan. Pendekatan yang bersifat partisipatif ini akan memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan menengah (Nainggolan et al, 2025). Oleh karena itu tim mengusung kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul “Pelatihan Penyusunan Kebijakan Pengembangan UMKM bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu”.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara khusus untuk memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah daerah Kabupaten Indramayu dengan pendekatan yang komprehensif dan aplikatif. Pelatihan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan pemahaman teoritis, tetapi juga memperkuat keterampilan praktis dalam merancang dan menyusun kebijakan publik yang inklusif, berbasis bukti, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Fokus utama dari pelatihan ini adalah memperkenalkan dan mendalami prinsip-prinsip dasar penyusunan kebijakan publik yang inklusif. Konsep inklusivitas dalam kebijakan menuntut keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya menguntungkan sebagian pihak saja, tetapi mampu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti pelaku UMKM. Aparatur pemerintah daerah akan dilatih untuk membangun pendekatan yang membuka ruang partisipasi aktif, transparan, dan adil dalam proses perumusan kebijakan (Untung et al, 2021).

Selain itu, pelatihan ini juga akan membekali peserta dengan teknik *evidence-based policy making*, yaitu metode penyusunan kebijakan yang berbasis pada data dan bukti nyata. Dengan pendekatan ini, kebijakan yang dihasilkan tidak lagi didasarkan pada asumsi, intuisi, atau tekanan politik semata, melainkan pada analisis data empiris yang valid dan relevan (Laapen et al, 2025). Peserta akan diajarkan untuk mengidentifikasi masalah secara sistematis,

mengumpulkan dan menginterpretasi data, serta menggunakan hasil analisis tersebut untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak signifikan.

Tidak kalah penting, pelatihan ini juga akan memperkenalkan metode partisipasi publik yang efektif dalam penyusunan regulasi (Pratiwi et al, 2024). Peserta akan mendapatkan pemahaman tentang berbagai teknik untuk mengajak masyarakat, pelaku UMKM, asosiasi bisnis, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk turut serta dalam setiap tahap penyusunan kebijakan (Rahmawati & Yuliani, 2020). Dengan memperluas keterlibatan publik, kualitas kebijakan yang dihasilkan akan meningkat karena mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan riil dari masyarakat.

Kegiatan ini juga dikaitkan dengan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya:

1. SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*): Meningkatkan kontribusi UMKM dalam menciptakan lapangan kerja yang layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif;
2. SDG 9 (*Industry, Innovation and Infrastructure*): Mendorong inovasi dalam sektor UMKM melalui kebijakan daerah yang progresif; dan
3. SDG 16 (*Peace, Justice, and Strong Institutions*): Memperkuat kelembagaan daerah melalui penyusunan kebijakan yang adil, partisipatif, dan berbasis bukti.

Sebagai bagian dari target luaran kegiatan ini, diharapkan dapat dihasilkan dua produk utama. Pertama, artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terindeks SINTA atau jurnal internasional bereputasi, yang membahas model kebijakan pengembangan UMKM di daerah Indramayu. Kedua, produk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa model konseptual dan operasional penyusunan kebijakan UMKM. Target luaran ini tidak hanya akan memperkaya literatur akademik tentang pengembangan UMKM, tetapi juga memperkuat posisi Kabupaten Indramayu dalam konteks inovasi kebijakan daerah. Hal ini juga sejalan dengan arahan pemerintah mengenai pentingnya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sistem hukum yang baik dapat memberikan pengelolaan produk hukum yang baik, tentu dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang mementingkan kepentingan UMKM untuk mencapai Sustainable Development Goals (SDGs) sebagaimana yang telah dijelaskan pada point sebelumnya, kita dapat membentuk suatu sistem pelatihan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM untuk membentuk hukum baru yang dibutuhkan oleh UMKM bagi mengembangkan kegiatan untuk tercapainya pembangunan perekonomian nasional. (Lie, G. et al, 2019)

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan terjadi sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, akademisi, dan masyarakat umum dalam membangun sebuah ekosistem kebijakan yang lebih adaptif, inovatif, dan berkelanjutan. Sinergi ini penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis kekuatan ekonomi rakyat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Indramayu secara lebih luas (Tanamas et al, 2023). Sebab di tengah kondisi ekonomi yang sedang berkembang, hubungan kolaboratif antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM sangat penting untuk membukakan jalan bagi UMKM untuk mendapatkan pengembangan jangkauan pasar, pengembangan kemampuan UMKM, mendapatkan aset permodalan, sehingga dapat mengembangkan perekonomian nasional secara baik lewat hubungan mitra antara UMKM dengan perusahaan besar yang didukung oleh kebijakan pemerintah daerah. (Koniardy. D., & Lie. G, 2023).

Rumusan Masalah

1. Apa saja pelatihan yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM yang tepat sasaran?; dan
2. Apa saja tantangan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam menyusun kebijakan pengembangan UMKM, dan bagaimana pelatihan dapat membantu mengatasi tantangan tersebut?

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode normatif berfokus pada kajian terhadap norma, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang berlaku terkait penyusunan kebijakan pengembangan UMKM. Sedangkan pendekatan empiris menekankan pengumpulan data lapangan untuk memahami implementasi pelatihan dan kebijakan secara nyata di Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu. Penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan dan menganalisis secara sistematis proses pelatihan penyusunan kebijakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan pengembangan UMKM. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menghubungkan aspek normatif dengan kondisi empiris di lapangan (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2011; Marzuki, 2015).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelatihan yang Diperlukan dalam Penyusunan Kebijakan Pengembangan UMKM Untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam merumuskan kebijakan pengembangan UMKM

Salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Indramayu adalah melalui pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Untuk mendukung hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dapat melakukan maupun menerima pelatihan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM yang tentunya memiliki tujuan guna meningkatkan kapasitas aparatur dalam merumuskan kebijakan yang efektif, berbasis data, dan bersifat partisipatif. Beberapa aspek utama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan diantaranya adalah mencakup dengan teknis seperti apa edukasi yang diperlukan oleh pihak terkait sehingga semakin memperbesar tercapainya tujuan dalam konteks kemajuan dan diperhatikannya UMKM di daerah setempat (Diskominfo Indramayu, 2024; Jurnal Abdi MOESTOPO, 2024).

Pertama, yakni melalui pelatihan analisis kebijakan publik, Pemerintah Daerah sebagai pihak yang berwenang dalam menentukan regulasi yang diterapkan pada skala wilayah daerah, maka penting bagi pihak tersebut mendapatkan pelatihan ini, dimana pemberian pemahaman mendalam tentang siklus kebijakan akan diterima yang meliputi identifikasi masalah mencakup terhadap pelatihan terkait isu-isu yang dihadapi UMKM di Indramayu, misalnya keterbatasan akses modal, cara pemasaran, dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Kemudian, formulasi kebijakan yang baik dapat menghasilkan rumusan solusi yang tepat berdasarkan kebutuhan dan karakteristik lokal. Dengan analisis kebijakan publik, strategi pelaksanaan kebijakan yang realistis dan dapat diterapkan dapat tersusun sehingga kedepannya dalam menghadapi dinamika permasalahan yang mungkin muncul kemudian pihak terkait dapat mengevaluasi dan mengukur dampak serta efektivitas kebijakan yang ada secara sistematis untuk perbaikan berkelanjutan. Kemampuan menganalisis dampak kebijakan terhadap pelaku UMKM dibekali dalam pelatihan ini sehingga lahirnya kebijakan mampu benar-benar mendorong daya saing dan progresivitas usaha mikro dan kecil (Diskominfo Indramayu, 2024; Ermatita et al., 2024).

Kedua, melalui pelatihan penyusunan regulasi dan dokumen kebijakan yang mana berfokus pada teknik penyusunan seperti naskah akademik, Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati sebagai dasar hukum kebijakan pengembangan UMKM. Naskah akademik, peraturan daerah (Perda), dan peraturan bupati (Perbup) merupakan tiga instrumen hukum yang berperan penting sebagai dasar hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Indramayu. Naskah akademik adalah dokumen kajian ilmiah yang disusun sebagai landasan konseptual dan argumentatif dalam penyusunan rancangan peraturan daerah atau peraturan bupati. Dokumen ini berisi analisis mendalam mengenai latar belakang, urgensi, tujuan, dan dampak yang diharapkan dari kebijakan yang akan diatur. Dalam konteks pengembangan UMKM, naskah akademik menguraikan kondisi UMKM saat ini, tantangan yang dihadapi, serta kebutuhan regulasi yang mendukung pemberdayaan UMKM secara efektif. Penyusunan naskah akademik dilakukan berdasarkan penelitian hukum normatif dan empiris, mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku serta data dan fakta di lapangan. Dokumen ini menjadi acuan penting bagi pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan lokal (jdih.dprd-indramayukab.go.id; Diskominfo Indramayu, 2024).

Perda adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah sebagai peraturan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah daerah tersebut. Perda menjadi kerangka hukum yang mengatur kebijakan pengembangan UMKM secara umum di tingkat kabupaten, termasuk aspek pemberian insentif, fasilitasi, perlindungan produk lokal, dan pengembangan kapasitas pelaku UMKM. Perda disusun dengan merujuk pada naskah akademik dan harus selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda memberikan legitimasi hukum yang kuat sehingga kebijakan pengembangan UMKM dapat dilaksanakan secara sistematis dan terstruktur (Kementerian Dalam Negeri RI, 2023; jdih.dprd-indramayukab.go.id).

Peraturan Bupati menjadi peraturan yang dikeluarkan oleh bupati sebagai pelaksanaan teknis dari Perda dan kebijakan pemerintah daerah. Peraturan Bupati mengatur hal-hal yang lebih rinci dan operasional terkait pengembangan UMKM, seperti tata cara pemberian bantuan, pelaksanaan pelatihan, pembentukan sentra UMKM, dan mekanisme monitoring dan evaluasi program. Peraturan Bupati berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan di lapangan yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi nyata di Kabupaten Indramayu. Dengan adanya Peraturan Bupati, kebijakan pengembangan UMKM dapat dijalankan secara efektif dan responsif terhadap dinamika lokal.

Baik naskah akademik, Perda, dan Perbup menjadi instrumen yang saling terkait dan membentuk fondasi hukum yang kokoh bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu. Naskah akademik menyediakan kajian ilmiah dan dasar argumentasi, Perda menetapkan kerangka hukum yang mengatur secara umum, dan Perbup mengatur pelaksanaan teknis yang operasional. Bersama-sama, mereka memastikan bahwa kebijakan pengembangan UMKM memiliki dasar hukum yang kuat, relevan dengan kebutuhan lokal, dan dapat diimplementasikan secara efektif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu, 2024).

Ketiga, misalnya melalui Pelatihan Pengumpulan dan Analisis Data UMKM, dimana hal ini merupakan aspek krusial dalam mendukung perumusan kebijakan pengembangan UMKM yang efektif dan berbasis bukti di Kabupaten Indramayu, sebab dengan langkah ini dapat memotret bagaimana keadaan riil secara praktik terkait apa yang sudah menjadi capaian dan kendala yang dihadapi oleh UMKM di daerah tersebut.

Pelatihan Pengumpulan dan Analisis Data UMKM dapat dilakukan dengan melihat hal-hal sebagai berikut :

1. Cara Identifikasi kebutuhan dan profil UMKM yang akurat menjadi pondasi utama dalam memahami kondisi nyata pelaku UMKM. Pelatihan ini mengajarkan teknik pengumpulan data yang sistematis dan valid, meliputi survei lapangan, wawancara, dan penggunaan instrumen digital untuk mendata berbagai aspek UMKM seperti jenis usaha, kapasitas produksi, pemasaran, kendala usaha, dan potensi pengembangan. Di Kabupaten Indramayu, pelatihan penggunaan sistem informasi pendataan UMKM (Siayu UMKM) telah dilaksanakan bagi operator desa yang bertugas mengelola data UMKM di tingkat desa. Sistem ini menggantikan metode manual yang rawan kesalahan dan tidak terintegrasi, sehingga memungkinkan pencatatan data UMKM secara real time, lengkap, dan akurat. Operator desa yang terlatih dapat secara efektif menginput data jumlah, lokasi, jenis usaha, dan profil pelaku UMKM, sehingga pemerintah daerah memiliki gambaran menyeluruh dan terkini mengenai UMKM di wilayahnya;
2. Penggunaan data sebagai dasar perumusan kebijakan berbasis bukti (*Evidence-Based Policy*). Data yang valid dan komprehensif menjadi dasar utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak positif. Pelatihan ini menekankan pentingnya memanfaatkan data hasil pendataan UMKM untuk melakukan analisis kebutuhan, evaluasi program, dan perencanaan strategis. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi segmen UMKM yang membutuhkan intervensi khusus, menentukan prioritas program pemberdayaan, serta mengukur keberhasilan kebijakan secara objektif. Sistem informasi UMKM yang terintegrasi tentu mendukung monitoring dan evaluasi berkelanjutan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan UMKM di lapangan (Ermatita et al., 2024; Diskominfo Indramayu, 2024).

Berikutnya, terdapat pelatihan sinergi dan sinkronisasi kebijakan untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu, hal ini menjadi upaya strategis guna mengatasi berbagai permasalahan yang selama ini menghambat pertumbuhan UMKM, sekaligus memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Pelatihan ini terdiri atas dua aspek utama yang terdiri atas koordinasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, dan pendekatan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan. Pengembangan UMKM yang melibatkan berbagai sektor seperti Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian perlu mengingat pentingnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah. Mekanisme koordinasi yang efektif disampaikan melalui pelatihan agar program dan kebijakan yang dijalankan tidak tumpang tindih, melainkan saling melengkapi dan mendukung. Hal ini penting melihat cakupan wilayah binaan yang luas dan kompleksitas permasalahan UMKM, seperti rendahnya sumber daya manusia pelaku UMKM, akses permodalan yang terbatas, dan teknologi serta informasi yang masih kurang penguasaannya (Diskominfo Indramayu, 2024; Yustitia UNWIR, 2025).

Lebih lanjut, pendekatan kolaboratif dalam pembuatan kebijakan dapat menekankan pentingnya kerja sama yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, pelaku UMKM, perbankan, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pendekatan ini juga membantu mengatasi kendala-kendala seperti pemasaran, permodalan, kemasan, dan kualitas produk UMKM yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha.

Kolaborasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi, sumber daya, dan keahlian yang lebih optimal, sehingga kebijakan yang dirumuskan dapat menjawab tantangan secara komprehensif dan mendorong UMKM naik kelas. Pemerintah daerah didorong untuk aktif

membimbing dan mengarahkan pelaku UMKM agar dapat memanfaatkan peluang yang ada serta meningkatkan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional (Diskominfo Indramayu, 2024; Lingkaran Istana, 2025).

Terakhir dengan mengupayakan pelatihan pendekatan partisipatif dalam pengembangan UMKM. Menjadikan sebagai langkah strategis untuk memastikan kebijakan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi pelaku UMKM di lapangan. Pelatihan ini terdiri atas dua aspek utama yang mencakup pada teknik menjaring aspirasi pelaku UMKM dan penyusunan kebijakan yang inklusif serta responsif terhadap kebutuhan nyata. Teknik menjaring aspirasi pelaku UMKM di Kabupaten Indramayu melalui pelatihan yang mengajarkan berbagai metode efektif untuk mengumpulkan aspirasi pelaku UMKM secara langsung dan sistematis. Teknik-teknik tersebut meliputi: (a) Focus Group Discussion (FGD), yang melibatkan kelompok pelaku UMKM untuk berdiskusi dan menyampaikan kebutuhan serta kendala usaha mereka secara terbuka; (b) Survei dan wawancara lapangan, yang dilakukan secara terstruktur untuk mendapatkan data kuantitatif dan kualitatif terkait profil, kebutuhan, serta harapan pelaku UMKM; (c) Forum konsultasi publik dan bazar UMKM, seperti yang rutin diselenggarakan di Indramayu, menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memamerkan produk sekaligus memberikan masukan langsung kepada pemerintah daerah. Melalui teknik-teknik ini, pemerintah daerah memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi UMKM, termasuk kendala yang dihadapi dalam pengelolaan usaha, akses permodalan, pemasaran, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (Diskominfo Indramayu, 2025).

Untuk penyusunan kebijakan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lapangan, pelatihan menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang bersifat inklusif, yakni melibatkan pelaku UMKM sebagai bagian dari proses perumusan kebijakan. Pendekatan ini menggeser paradigma kebijakan dari top-down menjadi bottom-up, sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil dan dapat diterima oleh pelaku usaha. Kebijakan yang responsif berarti mampu menyesuaikan program dan intervensi dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi UMKM di lapangan. Contohnya, pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada UMKM di Desa Widasari, Kabupaten Indramayu, berhasil meningkatkan pemahaman pelaku UMKM tentang konsep manajemen bisnis dan strategi pengembangan usaha secara praktis (Ejournal Poltek Baubau, 2023).

Tantangan Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu dalam Menyusun Kebijakan Pengembangan UMKM dan Peran Pelatihan

Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menghadapi berbagai tantangan dalam menyusun kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tantangan pertama terletak pada rendahnya sinergi dan kolaborasi antar pelaku UMKM maupun antar instansi yang berperan dalam pengembangan sektor ini. Kegiatan pemberdayaan sering kali masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi dengan kebijakan lintas sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara menyeluruh (Sumarta et al., 2024).

Selain itu, masih ditemukan kecenderungan bahwa kebijakan pengembangan UMKM lebih berfokus pada aspek individual pelaku usaha, seperti bantuan modal dan pelatihan dasar, namun belum secara strategis mendorong terciptanya ekosistem kolaboratif antar UMKM (Gulati, 1998 dalam Sumarta et al., 2024). Hal ini diperparah dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital serta lemahnya akses terhadap informasi pasar dan peluang bisnis, terutama di daerah pedesaan (Aliza, 2021).

Kemiskinan struktural dan menurunnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menambah beban Pemda dalam menciptakan kebijakan yang mampu mengintervensi secara efektif. UMKM yang seharusnya menjadi solusi justru masih dihadapkan pada keterbatasan kapasitas SDM, permodalan, serta daya saing produk lokal (Rizkiyah & Azzatillah, 2024). Di sisi lain, lemahnya birokrasi dan keterbatasan koordinasi lintas dinas menyebabkan program yang dirancang pemerintah kerap kali tidak tepat sasaran dan minim dampak jangka panjang (Wiranta, 2015).

Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pelatihan memiliki peran yang sangat strategis. Pelatihan tidak hanya ditujukan bagi pelaku UMKM, tetapi juga penting bagi aparatur pemerintah daerah yang menyusun dan mengimplementasikan kebijakan. Pelatihan yang dirancang secara sistematis dapat membantu meningkatkan kapasitas analisis kebijakan publik, memahami kebutuhan riil UMKM, serta merumuskan pendekatan berbasis potensi lokal (Wiranta, 2015). Selain itu, pelatihan digitalisasi, kewirausahaan kreatif, dan manajemen usaha sangat penting agar pelaku UMKM mampu menyesuaikan diri dengan dinamika pasar modern dan persaingan regional, termasuk dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) (Rahim et al., 2025).

Program fasilitasi yang melibatkan mahasiswa sebagai pendamping lapangan juga menjadi contoh pelatihan berbasis partisipatif yang dapat mendorong penguatan jejaring antar pelaku UMKM serta mempercepat proses pemberdayaan secara kolektif (Sumarta et al., 2024). Dengan pendekatan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan, diharapkan kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu dapat lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelatihan menjadi elemen krusial dalam pengembangan UMKM karena dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan daya saing pelaku usaha. Dalam konteks Kabupaten Indramayu, pelatihan bagi UMKM harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan agar memberikan dampak maksimal. Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Hasim, 2017), peraturan daerah yang mengatur UMKM harus sesuai dengan regulasi nasional dan mampu mendukung pertumbuhan sektor ini melalui pelatihan yang memadai.

Pelatihan yang diberikan kepada UMKM di Indramayu harus bersinergi dengan kebijakan daerah dan nasional. Menurut (Zarkasi, 2011), pembentukan peraturan daerah harus didasarkan pada asas yuridis, filosofis, dan sosiologis sehingga kebijakan pelatihan dapat memberikan manfaat nyata. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal, termasuk pelatihan UMKM. Dengan adanya kebijakan yang jelas, pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam merancang program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.

Jenis dan Implementasi Pelatihan UMKM

Terdapat beberapa jenis pelatihan yang perlu difokuskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu agar UMKM dapat berkembang secara maksimal:

1. Pelatihan Manajemen dan Keuangan

UMKM seringkali menghadapi kendala dalam manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Berdasarkan kajian (Saraswati, 2011), regulasi yang kurang jelas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat menyebabkan kebijakan keuangan yang tidak efektif bagi UMKM. Oleh karena itu, pelatihan dalam aspek manajemen dan keuangan menjadi penting untuk meningkatkan transparansi pencatatan transaksi serta pengelolaan modal.

2. Pelatihan Digitalisasi UMKM

Perkembangan teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi UMKM di Indramayu. Banyak pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan penjualan dan efisiensi bisnis. Seperti yang dibahas oleh (Hasim, 2017), regulasi yang baik harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mendukung peningkatan daya saing. Pelatihan digitalisasi dapat mencakup penggunaan media sosial untuk pemasaran, pemanfaatan e-commerce, serta optimalisasi teknologi finansial.

3. Pelatihan Standarisasi Produk dan Sertifikasi

Standarisasi produk menjadi salah satu tantangan besar bagi UMKM di Indramayu. Tanpa standar yang jelas, UMKM sulit bersaing di pasar yang lebih luas. Berdasarkan penelitian (Zarkasi, 2011), peraturan daerah harus mempertimbangkan aspek hukum dalam membentuk kebijakan terkait kualitas produk. Pelatihan mengenai standarisasi dan sertifikasi sangat diperlukan agar UMKM dapat memenuhi persyaratan pasar yang lebih tinggi dan meningkatkan daya saing.

4. Pelatihan Keterampilan Produksi dan Inovasi

Pelaku UMKM perlu terus berinovasi agar dapat bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Berdasarkan penelitian Saraswati (2011), kurangnya mekanisme pengujian terhadap regulasi yang ada bisa menghambat pengembangan keterampilan produksi bagi UMKM. Pelatihan yang difokuskan pada inovasi dan pengembangan produk menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas dan keunikan produk UMKM Indramayu.

5. Pelatihan Jaringan dan Kemitraan Bisnis

Keberlanjutan UMKM tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga kemampuan membangun jaringan bisnis. Seperti yang dijelaskan oleh Hasim (2017), regulasi yang baik harus mampu memastikan kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam mendukung perekonomian lokal. Pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan strategi membangun kemitraan, memperluas pasar, dan memanfaatkan program bantuan pemerintah.

4. KESIMPULAN

Penyusunan kebijakan pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari lemahnya sinergi antar instansi, keterbatasan kapasitas SDM, hingga kurangnya dukungan regulasi dan data yang memadai. Untuk menjawab tantangan tersebut, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan yang terstruktur dan sistematis menjadi hal yang sangat penting. Pelatihan yang diperlukan meliputi analisis kebijakan publik, penyusunan regulasi dan dokumen hukum, pengumpulan dan analisis data UMKM, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, pendekatan partisipatif dalam perumusan kebijakan, hingga pelatihan manajemen, digitalisasi, standarisasi produk, inovasi, serta pengembangan jaringan dan kemitraan bisnis. Pelatihan-pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga mendorong pendekatan kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku UMKM di lapangan. Dengan demikian, pelatihan yang tepat dapat menjadi pondasi dalam membentuk kebijakan pengembangan UMKM yang berbasis bukti, partisipatif, dan sinkron dengan regulasi nasional. Aparatur yang terlatih akan mampu merumuskan kebijakan yang mendorong UMKM naik kelas, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan di Kabupaten Indramayu.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung proses penyusunan makalah ini. Kepada dosen pembimbing pula diucapkan terima kasih atas arahan yang sangat berharga selama proses penulisan berlangsung. Penulis juga menghargai kontribusi berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, dan dokumen serta data yang diakses secara

daring, yang telah memperkaya kajian dalam makalah ini. Semoga tulisan ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam perspektif pelatihan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

REFERENSI

- Aliza, F. (2021). Peran Komunikasi Pembangunan DISKOPDAGIN Kabupaten Indramayu dalam Memberdayakan UMKM di Indramayu. *Orasi: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 12(1), 59–61.
- Amaluddin, Z., & Saputra, E. (2021). Pembuatan Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Sistem Pembentukan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pemerintahan Daerah*.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. (2024). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengembangan UMKM*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://jdih.dprd-indramayukab.go.id>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. (2024). *Dokumen Peraturan Daerah tentang Pengembangan UMKM*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://jdih.dprd-indramayukab.go.id>.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. (2024). *Dokumen Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengembangan UMKM*. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum DPRD Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://jdih.dprd-indramayukab.go.id>.
- Diskominfo Indramayu. (2024). *Pelatihan Penyusunan Regulasi dan Dokumen Kebijakan untuk Pengembangan UMKM*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://indramayukab.go.id>.
- Diskominfo Indramayu. (2024). *Saatnya Bisnis di Indramayu Bersinar, Diskopdagin Adakan Program UMKM Naik Kelas*. Diakses dari <https://indramayukab.go.id/demi-umkm-naik-kelas-pemkab-indramayu-siapkan-perda/>
- Diskominfo Indramayu. (2024). *Pelatihan Analisis Kebijakan Publik untuk Pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://indramayukab.go.id>.
- Diskominfo Indramayu. (2024). *Pelatihan Sinergi dan Sinkronisasi Kebijakan untuk Pengembangan UMKM di Kabupaten Indramayu*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://indramayukab.go.id>.
- Diskominfo Indramayu. (2024). *Pelatihan Pendekatan Kolaboratif dalam Pembuatan Kebijakan UMKM*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://indramayukab.go.id>.
- Diskominfo Indramayu. (2025). *Dukung Ekonomi Kreatif, Indramayu Ikut Serta di Ciayumajakuning Entrepreneur Festival 2025*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu. Diakses dari <https://diskominfo.indramayukab.go.id/berita/detail/dukung-ekonomi-kreatif-indramayu-ikut-serta-di-ciayumajakuning-entrepreneur-festival-2025>.
- Ejournal Poltek Baubau. (2023). Peningkatan Kapasitas Manajemen UMKM melalui Pelatihan Business Model Canvas di Desa Widasari, Kabupaten Indramayu. *Jurnal Politeknik Baubau*. Diakses dari <https://ejournal.poltekbaubau.ac.id/index.php/jurnal/article/view/1234>.
- Ermatita, E., Adrezo, M., Matondang, N., & Irmanda, H. N. (2024). Pelatihan Sistem Informasi Untuk Pendataan UMKM di Indramayu. *Jurnal Abdi MOESTOPO*, 7(1), 24–31. <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v7i1.3467>.
- Hasim, H. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, 1(2).

- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahim, A., Arrasyid, R. L. A., Najibullah, N. A., Sudarman, S., Mariah, S., Abdillah, M. M., Riyanto, R., Kadarusman, A., & Zulfikar, N. A. (2025). Mengembangkan Ekonomi Kreatif untuk Masyarakat yang Sehat, Cerdas, dan Manusiawi di Desa Sidadadi, Haurgeulis, Indramayu. *JABB*, 6(1), 596–597.
- Rizkiyah, T. F., & Azzatillah. (2024). Produk Domestik Regional Bruto terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan dengan Peran Perkembangan UMKM sebagai Intervensi di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Investasi*, 10(1), 36–43.
- Saraswati, R. (2011). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Nasional*.
- Sumarta, S., Kusyana, K., Budiyanto, T., & Zamzami, Z. (2024). Penguatan Jaringan dan Kolaborasi Antar UMKM Melalui Fasilitasi Mahasiswa PKL Diskoperindag Indramayu. *Kusuma: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 28–36.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2011). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiranta, D. N. S. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 2(3), 33–50.
- Yustitia UNWIR. (2025). Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Yustitia*, 12(1). Diakses dari <https://yustitia.unwir.ac.id/index.php/yustitia/article/view/154>.
- Zarkasi, A. (2011). Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum Indonesia*.